



Veronika Yuliani Dua
 Lodan¹
 Imanuel Wellem²
 Viktor Eko
 Transilvanus³

STRATEGI PENYUSUNAN PERBUP STANDAR HARGA SATUAN (SHS) PADA BPKAD KABUPATEN SIKKA DALAM PERENCANAAN APBD T.A 2025

Abstrak

Perkembangan era globalisasi yang berkembang pesat ditandai dengan kemajuan teknologi yang telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia. Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, atau mencapai tujuan penelitian. Dalam penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) Standar Harga Satuan (SHS) pada BPKAD Kabupaten Sikka untuk perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, berbagai tahapan dan indikator telah diterapkan untuk mencapai hasil yang efektif, efisien, dan transparan.

Kata kunci: PERBUB; Standar Harga; BPKAD

Abstract

The rapid development of the globalization era is marked by technological advancements that have brought significant changes in various aspects of life worldwide. Data collection techniques are methods or approaches used by researchers to gather the necessary information or data to answer research questions, test hypotheses, or achieve research objectives. In the formulation of the Regent Regulation (Perbup) on the Standard Unit Price (SHS) at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Sikka Regency for the 2025 Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) planning, various stages and indicators have been implemented to achieve effective, efficient, and transparent results.

Keywords: Perbup; Standard Price; BPKAD

PENDAHULUAN

Perkembangan era globalisasi yang berkembang pesat ditandai dengan kemajuan teknologi yang telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membuka akses yang lebih luas dan cepat terhadap informasi sehingga memungkinkan berbagai sektor untuk dapat berkembang lebih cepat dan efisien. Inovasi teknologi terus mendorong perubahan, mempengaruhi cara kita berkomunikasi, bekerja, dan belajar. Perubahan ini juga menciptakan tantangan baru, seperti kesenjangan digital dan kebutuhan akan ketrampilan digital yang lebih tinggi. Namun tantangan seperti ini perlu diatasi oleh pemerintah dan instansi Pendidikan yang dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa akses terhadap teknologi ini dapat merata dan inklusif.

Dalam mengatasi tantangan ini, pemerintah dan instansi Pendidikan di Indonesia harus mengimplementasikan kebijakan yang mendukung proses pembelajaran dan akses teknologi yang merata demi meningkatkan ketrampilan bagi mahasiswa. Pendidikan merupakan salah satu fondasi utama pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan, generasi muda dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi warga yang produktif, berdaya saing, dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Di era modern yang terus berubah, tantangan dalam dunia pendidikan semakin kompleks. Salah satu cara untuk menjawab tantangan ini adalah dengan mengadopsi konsep kurikulum merdeka.

^{1,2,3} Universitas Nusa Nipa
 email: yulianiveronika678@gmail.com¹

Kurikulum Merdeka adalah pendekatan pendidikan yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa dan dosen dalam merancang proses pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan industri dan tantangan global. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Kurikulum ini menerapkan sebuah konsep pembelajaran yang pada awalnya berpusat pada pendidik berubah menjadi berpusat pada peserta didik. Peserta didik dituntut untuk dapat mandiri, aktif, dan kreatif dalam setiap pembelajaran yang dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan prinsip utama dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang menekankan pentingnya memberikan kebebasan dan kemerdekaan bagi mahasiswa dalam menentukan jalur pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. (Arafu et al., 2023)

Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa agar menguasai berbagai keilmuan untuk memasuki dunia kerja. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Simatupang & Yuhertiana, 2021). Proses pembelajaran pada Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang menjadi salah satu bentuk dalam proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*students centered learning*) yang akan memberikan tantangan dan kesempatan pada perkembangan individu, inovasi, kreativitas, kapasitas, dan kebutuhan mahasiswa dalam menemukan pengetahuan sesuai dinamika kenyataan lapangan. Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan *hard skill* dan *soft skill* mahasiswa terbentuk dengan kuat melalui permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, tuntutan kinerja, syarat kemampuan, target dan pencapaian. Sehingga menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, dan profesional. (Kemendikbud., 2020) dalam (Arafu et al., 2023). Salah satu program utama dalam MBKM ini adalah Magang, yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terjun langsung ke dunia kerja.

Magang merupakan kegiatan yang direncanakan dan tertuang dalam kurikulum pembelajaran, dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai industri dan dunia kerja (IDUKA), sekaligus memberikan ruang dan kesempatan untuk mengaplikasikan teori dan praktik lapangan serta mendekatkan mahasiswa kepada user. Magang merupakan usaha sistematis yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi vokasi, menyiapkan mahasiswa untuk mengukur kompetensi yang dikuasai dalam rangka mencapai sikap, pengetahuan dan keterampilan atau keahlian tertentu (Melati & Artikel, 2018). Melalui magang, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari di kelas, membangun jaringan profesional, serta meningkatkan *soft skill* seperti komunikasi, kerja tim, dan *problem-solving*. Universitas Nusa menyikapi program ini dengan antusias dan berkomitmen untuk mendukung mahasiswa dalam menjalankan magang di berbagai perusahaan dan industri. Sejumlah perguruan tinggi di Indonesia telah banyak menyelenggarakan kegiatan Magang Bersertifikat bagi mahasiswanya. Salah satu Perguruan tinggi yang juga menjalankan kegiatan Magang ini adalah Universitas Nusa Nipa Indonesia.

Universitas Nusa Nipa merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Kabupaten Sikka yang didirikan sejak tahun 2005, dan pernah meraih penghargaan berprestasi dalam implementasi program Merdeka Belajar pada tahun 2023. Universitas Nusa Nipa juga menjalin kerja sama dengan beberapa instansi pemerintah yang berada di kabupaten sikka, salah satunya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan menjadi tempat magang bagi mahasiswanya.

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebagai salah satu perangkat daerah pada lingkup pemerintahan Kabupaten Sikka yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga berperan dalam menyusun kebijakan dan pedoman teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu, BPKAD juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan pengelolaan anggaran dan aset daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sikka memiliki beberapa bidang yang fokus pada pengelolaan keuangan dan aset daerah. Salah satu bidang

utamanya adalah Bidang Aset. Dalam bidang aset, terdapat beberapa sub bidang penting yang masing-masing memiliki peran khusus. Sub bidang tersebut meliputi Penatausahaan dan Pelaporan, yang bertanggung jawab atas pencatatan dan penyusunan laporan terkait aset daerah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Kemudian, ada sub bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, yang fokus pada optimalisasi penggunaan aset serta pengawasan agar aset tidak disalahgunakan dan pada sub bidang Pengamanan dan Mutasi Aset, yang memastikan keamanan aset dari kerusakan atau kehilangan dan mengatur proses pemindahan kepemilikan atau penggunaan aset.

Pada bidang Aset ini memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh aset daerah terinventarisasi dan terpelihara dengan baik, termasuk melalui perawatan dan perbaikan rutin. Pengawasan dan pengendalian aset dilakukan secara terus-menerus untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan aset digunakan sesuai peruntukannya. Selain itu, penyusunan laporan berkala tentang status dan kondisi aset dilakukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Penilaian aset secara periodik juga dilakukan guna menentukan nilai ekonomisnya, serta optimalisasi penggunaan aset agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi daerah.

Bidang Aset memiliki beberapa sub bidang di dalamnya terdapat beberapa sub bidang di dalamnya, yaitu Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset, Sub Bidang Pengamanan dan Mutasi Aset, serta Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, yang masing-masing memiliki peran penting dalam pengelolaan aset daerah secara menyeluruh dan terintegrasi. Secara umum, Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset bertugas meneliti kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD), menyiapkan dan meneliti dokumen terkait penetapan status penggunaan dan pemanfaatan BMD, melaksanakan penilaian BMD, serta menghimpun laporan pemeliharaan BMD secara berkala. Selain itu, sub bidang ini menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan BMD, melakukan penilaian kinerja pegawai, menyusun standarisasi sarana dan prasarana, serta menyusun standarisasi harga satuan umum. Berdasarkan Pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis selama magang di bidang Aset salah satu masalah yang terdapat pada sub bidang pemanfaatan dan yang terkhusus pada penetapan Standar Satuan Harga adalah keterlambatan penyusunan dan pengesahan dalam penyusunan APBD dan pelaksanaan anggaran.

Beberapa permasalahan umum yang sering terjadi dalam penyusunan anggaran antara lain: (1) Ketidakjelasan tujuan dan prioritas (2) Kurangnya data dan informasi (3) Kurangnya partisipasi dan koordinasi (4) Ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Selain itu, juga terdapat permasalahan pada penggunaan SHS yaitu: (1) Ketidakakuratan SHS: SHS yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam penentuan harga pada proyek konstruksi atau kegiatan pembangunan lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan penggunaan dana publik yang tidak efektif dan efisien, serta menimbulkan potensi kerugian keuangan. (2) Kurangnya transparansi dan akuntabilitas: Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan SHS dapat menyebabkan praktik mark up harga atau pemotongan kualitas bahan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan bagi negara dan masyarakat. (3) Kurangnya pembaruan SHS: Kurangnya pembaruan SHS secara teratur dapat menyebabkan ketidakakuratan dan ketidaksempurnaan SHS yang digunakan. (4) Kurangnya pemahaman dan penggunaan yang tepat: Kurangnya pemahaman dan penggunaan SHS yang tepat dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan SHS pada proyek konstruksi atau kegiatan pembangunan lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakakuratan penentuan harga dan penggunaan dana publik yang tidak efektif dan efisien.

METODE

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, atau mencapai tujuan penelitian. Teknik ini mencakup berbagai pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data. Phares (1992) menambahkan bahwa bagi psikolog klinis, wawancara merupakan teknik yang paling dasar dan berguna karena hasilnya dapat membantu psikolog untuk memahami masalah klien, membuat prediksi, dan mengambil keputusan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui serangkaian kegiatan tanya-jawab atas beberapa pertanyaan yang kemudian memberikan data atas masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Menurut Burhan Bungin (2012:67) ada dua tipe wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, karena dengan wawancara mendalam bisa digali mengenai apa yang tersembunyi di sanubari seseorang, apakah yang menyangkut masa lampau, masa kini, maupun masa depan. (Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Ardiansyah et al., n.d.2015). Dalam laporan ini wawancara dilakukan dengan Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Bidang Aset.

Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang melibatkan pengamatan sistematis dan terstruktur terhadap fenomena atau objek tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristiknya, perilaku, atau pola yang muncul. Dalam observasi, peneliti secara langsung memerhatikan dan mencatat apa yang terjadi tanpa memengaruhi atau mengubah situasi yang diamati. Metode ini dapat digunakan dalam berbagai konteks penelitian, baik ilmiah maupun non-ilmiah, dan dapat dilakukan secara langsung atau melalui alat bantu seperti kamera atau alat perekam lainnya. (Muntama Budiarti et al., n.d.2024)

Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dalam studi dokumen dilakukan melalui pengambilan data sekunder dari instansi terkait, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka. Data yang dikumpulkan mencakup laporan resmi, rencana strategis, serta dokumen peraturan daerah dan Undang-undang yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data berdasarkan pendapat Noeng Muhadjir (1998: 104) dalam (Ahmad & Muslimah, 2021) adalah Usaha menemukan dan mengganti dengan dengan sistematis data hasil wawancara, observasi, dan lainnya sehingga dapat peneliti memahami tentang kasus yang sedang diteliti dan dapat disajikan untuk temuan akan datang sehingga dalam upaya meningkatkan pemahaman analisis harus dilanjutkan dengan mencari makna.

Miles dan Huberman (1994) menggambarkan analisis data kualitatif sebagai berikut:

- a. Memadatkan data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data mentah. Ada pula yang menggunakan kata mereduksi data untuk menyebut tahapan ini.
- b. Menampilkan data yang sudah dipadatkan tadi ke dalam suatu bentuk untuk membantu penarikan kesimpulan,
- c. Menarik dan verifikasi kesimpulan, yaitu proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis memulai kegiatan magang pada hari Selasa, 13 Agustus 2024. Kegiatan magang ini dilaksanakan selama kurang lebih 5 bulan, mengikuti jadwal kerja yang berlaku, yaitu setiap hari Senin hingga Jumat. Waktu pelaksanaan kegiatan magang setiap harinya dimulai dari pukul 07.30 hingga 16.00 WITA. Selama magang di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, penulis ditempatkan di Bidang Aset. Kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh penulis selama magang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Scan RKBMD T.A 2024
2. Kompilasi Hail Suvei Harga Barang Dan Jasa Rancangan Lampiran SHS peraturan Bupati Tentang; Standar satuan harga, Standar Biaya umum, Analisis standar belanja dan Harga satuan pokok kegiatan T.A 2025.
3. Menyandingkan hasil perhitungan Dinas Pekerjaan Umum terhadap Lampiran ASB Rancangan Peraturan Bupati tentang standar satuan haraga, standar biaya umum, analisis standar belanja dan harga satuan pokok kegiatan T.A 2025

4. Menyusun standar harga (Perlengkapan Dinas)
5. Menyusun standar harga (Perlengkapan Laboratorium)
6. Membuat surat permohonan sewa Tempat Usaha Kuliner di Jalan Mawar Kelurahan Madawat Kecamatan Alok.
7. Kompilasi hasil survei harga barang dan jasa lampiran SHS Rancangan Peraturan Bupati Tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Modal, Analisis Standar Biaya dan Harga Satuan Pokok Kegiatan T.A 2025 (Perlengkapan Dinas).
8. Turun Lapangan: Melakukan survei Lokasi untuk tempat sewa Pembuatan Depot Air Minum di Kelurahan Wolomarang.
9. Turun Lapangan: Melakukan pengukuran pada Lokasi rumah dinas milik pemda di Kelurahan Kota Uneng.
10. Turun Lapangan: Melakukan pengukuran tanah Bersama petugas kantor pertanahan dan melakukan pengaman administrasi berupa sertifikat: Fisik, Administrasi, Sertifikat. Pada Tanah Pemda di SDN Oka Kecamatan Palue.
11. Membuat laporan perjalanan dinas ke Palue
12. Menyusun Standar Harga (Pendukung Perlengkapan Olahraga)
13. Scan Daftar Kendaraan Untuk KPK
14. Scan Pakta Integritas
15. Rekap Laporan Pengadaan BMD berupa Aset Tetap Lainnya (SMP)
16. Membuat surat permohonan sewa tempat usaha warung makan di jalan waiklau dan turun lapangan melakukan Pengukuran tempat/lokasi usaha warung makan di Jl. Waiklau.
17. Menyiapkan lampiran SHS Rancangan Peraturan Bupati.
18. Membuat surat rekomendasi permohonan pemanfaatan sewa Gedung dinas.
19. Turun Lapangan: Pengukuran Tanah Milik PEMKAB Sikka, Bersama Petugas Kantor Pertanahan, Pada Tempat Peristirahatan (Cottage) Di Desa Wairterang Kecamatan Waigete.
20. Turun lapangan melakukan pengambilan titik koordinat pada ruas jalan kantor camata Alok Barat
21. Membuat Hasil Laporan perjalanan dinas berkaitan dengan pengukuran tanah pada Desa Wairterang Kecamatan Waigete.
22. Turun Lapangan: Survey Pengambilan foto titik koordinat pada jalan Wolomarang-Aimitat Kelurahan Wailiti. Dalam rangka pensertipikatan jalan.
23. Membuat Surat Permohonan Sewa Tanah, Pemkab Sikka pada Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kota Baru Kecamatan Alok, Untuk Tempat Pemasangan PJU/Bilboard
24. Mengikuti Rapat Di Bagian Hukum Setda berkaitan dengan Pembahasan SHS, SBU, ASB Dan HSPK oleh BPKAD sesuai dengan peraturan Bupati Sikka Tahun Anggaran 2025.
25. Membuat Daftar Pensertipikatan Tanah Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024
26. Croscheck Rekon Penghapusan Aset lain-lain.
27. Membuat surat permohonan sewa penggunaan Lapangan Kota Baru dalam rangka kegiatan perlombaan HUT Tim Pelayanan GMIT dan Reformasi.
28. Membuat daftar tanah pemerintah kabupaten sikka yang dipergunakan untuk jalan.
29. Membuat Berta Acara serah terima serfipikat tanah dari pemerintah kabupaten sikka kepada Kementerian agama kabupaten sikka.
30. Turun lapangan melakukan penghapusan BMD Pada Dinas Kominfo.
31. Turun lapangan melakukan penghapusan BMD Pada Kelurahan Kota Baru, SMPN Alok.
32. Turun lapangan melakukan penghapusan BMD Pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil.
33. Membuat berita acara hasil pemeriksaan faktual lapangan untuk proses penghapusan barang milik daerah tahun 2024.
34. Melakukan Verifikasi laporan bulanan.
35. Membuat pengarsipan dan pengkodean pada berkas Tanah
36. Membuat rekap daftar pengguna barang Tahun 2024
37. Turun lapangan melakukan pemasangan plank pada tanah Pemkab Sikka di Kecamatan Talibura yaitu pada dua titik Desa Nebe dan Desa Talibura.
38. Turun lapangan melakukan pemasangan plank pada tanah Pemkab Sikka di Kecamatan Bola dan Waigete.

39. Turun lapangan melakukan penagihan terkait sewa tanah dan rumah dinas milik pemerintah kabupaten sikka di Kecamatan Alok Barat dan Magepanda
40. Turun lapangan melakukan Identifikasi dan Verifikasi tanah permohonan kabupaten sikka atas permohonan hibah tanah oleh Desa Nita Kecamatan Nita.

Pembahasan

Hasil Observasi dan Wawancara

Dalam memperoleh informasi terkait Strategi dalam Penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) Standar Harga Satuan pada BPKAD Kabupaten Sikka, kegiatan ini dilakukan melalui wawancara, observasi di BPKAD Kabupaten Sikka. Wawancara dilakukan berdasarkan indikator berikut:

1. Analisis Kebutuhan dan Tujuan

Berdasarkan dengan analisis kebutuhan dan tujuan penulis melakukan wawancara dengan kasubid pemanfaatan dan pengendalian aset pada bidang aset.

a. Kebutuhan utama yang diidentifikasi dalam penyusunan SHS

Dalam penyusunan Sistem Hukum dan Standar (SHS), kebutuhan utama yang harus diidentifikasi mencakup beberapa aspek krusial. Dari segi regulasi, diperlukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar nasional dan internasional untuk memastikan kepatuhan hukum. Secara teknis, penyusunan SOP yang jelas, infrastruktur pendukung, serta sistem pemantauan dan evaluasi harus tersedia guna menjamin implementasi yang efektif. Dari sisi sumber daya manusia, pelatihan dan sertifikasi menjadi esensial untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kompetensi yang memadai. Selain itu, aspek sosial dan budaya harus diperhatikan dengan mengedepankan edukasi serta sosialisasi agar SHS dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat atau organisasi.

b. Tujuan utama dari penyusunan SHS

Tujuan utama dari penyusunan Sistem Hukum dan Standar (SHS) adalah untuk menciptakan kerangka hukum dan operasional yang jelas, terstruktur, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku guna meningkatkan kepatuhan, efisiensi, dan transparansi dalam suatu sektor atau organisasi. SHS bertujuan untuk memastikan bahwa semua prosedur, kebijakan, dan standar yang diterapkan telah selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional maupun standar internasional yang relevan, sehingga dapat mengurangi risiko hukum, meningkatkan kualitas layanan atau produk, serta mendukung tata kelola yang baik.

2. Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Sumber data apa saja yang digunakan dalam penyusunan SHS

Sumber data yang digunakan dalam proses penetapan standar harga satuan berupa e-Katalog dan penyedia berupa toko, apotek, UD, CV, dan PT yang berada di kabupaten sikka.

b. Metode apa yang digunakan untuk mengumpulkan data harga barang dan jasa yaitu dengan melakukan survei lapangan dan wawancara terhadap penyedia.

3. Proses verifikasi dan validasi data harga dilakukan

Proses verifikasi dan validasi data harga yang telah dikumpulkan sebelum penyusunan standar harga satuan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Tim penyedia terlebih dahulu mendistribusikan lembar survei kepada penyedia barang atau toko-toko terkait. Data hasil survei tersebut kemudian dikompilasi oleh masing-masing tim ke dalam format Excel yang telah ditetapkan berdasarkan hasil rapat. Dalam rapat tersebut, ditentukan bahwa penetapan harga dasar mengacu pada harga tertinggi dari hasil survei. Selanjutnya, data yang telah dikompilasi akan dimasukkan ke dalam Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) guna memastikan bahwa standar harga yang ditetapkan bersifat akurat dan transparan.

4. Penetapan Harga Standar

a. Bagaimana proses penetapan standar harga satuan dilakukan?

1. Persiapan dan Pelaksanaan Survei;

Tim penyedia terlebih dahulu menyusun formulir survei, mencetaknya, dan mendistribusikannya kepada masing-masing tim penyedia. Sebelum pelaksanaan

- survei, dilakukan pemberitahuan resmi melalui surat kepada penyedia barang dan toko-toko dengan koordinasi yang jelas.
- Tim penyedia kemudian melaksanakan survei langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data harga dari berbagai sumber yang telah ditentukan.
2. **Kompilasi dan Analisis Data;**
Data hasil survei dikompilasi oleh tim penyedia dan disusun dalam format yang telah ditetapkan.
Wakil Ketua Tim Koordinasi melakukan verifikasi terhadap keseluruhan hasil survei, yang selanjutnya digunakan sebagai lampiran dalam penyusunan rancangan standar harga satuan.
 3. **Pembahasan dan Penyusunan Rancangan;**
Tim penyusun mengadakan rapat pembahasan awal untuk menelaah hasil survei dan menyusun rancangan standar harga satuan.
Rancangan tersebut kemudian diajukan untuk dibahas dalam rapat bersama guna mendapatkan masukan dan penyempurnaan.
Hasil pembahasan dituangkan dalam notulen rapat sebagai dasar revisi oleh tim penyusun.
 4. **Revisi dan Harmonisasi Regulasi;**
Tim penyusun melakukan revisi rancangan berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam rapat bersama Tim Produsen Daerah.
Draf yang telah direvisi diajukan untuk proses harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham).
Dilakukan pembahasan bersama Kanwil Kemenkumham untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.
Jika diperlukan, dilakukan revisi lebih lanjut berdasarkan hasil pembahasan dengan Kanwil Kemenkumham.
 5. **Penetapan, Pengesahan, dan Publikasi**
Setelah finalisasi, rancangan ditetapkan oleh Penjabat (Pj) Bupati Sikka, diundangkan oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda), dan disahkan oleh Kepala Subbagian (Kasubag) Hukum.
Peraturan Bupati yang telah disahkan kemudian dipublikasikan melalui situs web resmi atau didistribusikan dalam bentuk soft copy dan hard copy kepada perangkat daerah terkait.
- b. **Bagaimana koefisien dan indeks digunakan dalam penetapan harga?**
Dalam koefisien dan indeks harga menggunakan harga standar maksimum/harga tertinggi lalu dikompilasi lagi komponen pembentuk untuk harga standar ditambah PPN 11% dan tingkat inflasi 2,19% (tingkat inflasi dari bulan juni ke juni) berdasarkan hasil berita acara notulen rapat. Dari hasil kompilasi didapatkan harga sasaran untuk masing-masing barang item belanja yang akan dilampirkan pada perbup. Berdasarkan hasil ini ada beberapa harga satuan yang tidak ada penyedia maka tim menggunakan pencarian melalui e-Katalog, jika tidak ditemukan maka tetap menggunakan harga tahun sebelumnya.
5. **Transparansi dan Partisipasi;**
 - a. **Bagaimana BPKAD Kabupaten Sikka memastikan transparansi dalam proses penetapan harga?**
Transparansi dan proses penetapan harga melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang dibuat berdasarkan Sk Bupati terkait tim penyusun yaitu dari beberapa OPD yaitu; Baperida, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Rumah Sakit, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
 - b. **Bagaimana langkah-langkah yang diambil untuk memastikan akuntabilitas dalam penetapan standar harga?**
Langkah-langkah yang diambil untuk memastikan akuntabilitas yaitu dengan mengembangkan strategi untuk mempublikasikan SHS secara transparan dengan melalui situs web resmi dan mensosialisasikan penggunaannya terhadap pihak terkait.
 6. **Evaluasi dan Pengendalian**

Bagaimana hasil evaluasi digunakan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan pada SHS?

Dalam evaluasi terkait hasil dari penetapan peraturan bupati standar harga satuan dapat ditemukan review dari pihak inspektorat terhadap dokumen yang telah ditetapkan.

SIMPULAN

Dalam penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) Standar Harga Satuan (SHS) pada BPKAD Kabupaten Sikka untuk perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, berbagai tahapan dan indikator telah diterapkan untuk mencapai hasil yang efektif, efisien, dan transparan. Adapun kesimpulan dari hasil magang ini adalah sebagai berikut:

Analisis Kebutuhan dan Tujuan: Proses identifikasi kebutuhan dan penetapan tujuan yang jelas sangat penting untuk memastikan bahwa semua kebutuhan terkait barang dan jasa telah diidentifikasi dan bahwa tujuan penyusunan SHS dapat dicapai. Tujuan utama meliputi peningkatan efisiensi anggaran, pengendalian biaya, dan transparansi dalam penggunaan anggaran.

Pengumpulan dan Pengolahan Data: Menggunakan sumber data primer dan sekunder yang akurat dan tepercaya sangat penting dalam pengumpulan data. Survei lapangan, wawancara dengan vendor, dan analisis dokumen adalah metode yang efektif dalam mengumpulkan data harga barang dan jasa. Studi literatur dan studi komparatif dengan wilayah lain juga berperan penting dalam memastikan keakuratan data.

Analisis dan Verifikasi Data: Proses analisis dan verifikasi data dilakukan dengan menyusun kertas kerja yang berisi analisis biaya dan benchmarking harga dengan pasar. Proses verifikasi dan validasi data melalui cross-check dari berbagai sumber dan konsultasi dengan ahli memastikan keakuratan data yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfreda, A. A., & Goo, E. E. K. (2024). Analisis Biaya Operasional Dan Simpanan Dalam Memaksimalkan Sisa Hasil Usaha Pada KSP Kopdit Tuke Jung Nele. *AKUNTANSI* 45, 5(1), 30-43.
- Aquinaldo, T. N., Ghetta, A. P. K., & Juru, P. (2024). Analisis Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3810-3814.
- Bunga, F. M., Obon, W., & Meylano, N. H. (2024). The Effect of Emotional Branding and Experiential Marketing on Chosik (Chocolate Sikka) Purchasing Decisions in Sikka Regency. *International Journal of Research in Social Science and Humanities (IJRSS) ISSN: 2582-6220, DOI: 10.47505/IJRSS*, 5(8), 61-75.
- Bure, M. R., Wisang, I. V., & Juru, P. (2024). Kinerja Pegawai Ditinjau Dari Pengembangan Karir Dan Motifasi Kerja, Studi Kasus Pada Kantor Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 6600-6606.
- Buu, A. L., Dekrita, Y. A., & Rangga, Y. D. P. (2024). Implementasi Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat. *Jurnal Simki Economic*, 7(1), 156-167.
- Chuesta, R. N. B., Sanga, K. P., & Ghetta, A. P. (2024). Peran Agency Theory Terkait Manajemen Risiko Kredit dalam Upaya Meminimalisir Kredit Bermasalah pada KSP Kopdit Obor Mas Kanca Pasar Alok. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, 5(2), 1354-1359.
- Da Rato, E. Y., Dekrita, Y. A., & Aek, K. R. (2024). Analisis Perencanaan Laba Dengan Penerapan Titik Impas Pada Perumda Air Wair Pu'an Kabupaten Sikka. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(2).
- Da Silva, Y. O., Temu, T. J., & Lamawitak, P. L. (2024). Knowledge Management-Based Efforts To Improve MSME Performance (Credit Union Intervention for MSME Actors in Sikka Regency). *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science*, 5(4), 429-434.
- Daud, A., Dj, A. A., Adianita, H., & Mado, Y. J. (2024). The Influence of Participative

- Leadership Style on Job Satisfaction with Organizational Citizenship Behavior as a Moderating Variable. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(4), 2192-2200.
- Dekrita, Y. A., Afrianti, M., Della, M. F. C., Devance, M. R., Seka, G. F., Nunuhitu, P. C., ... & Bunga, M. A. V. (2024). Pentingnya Pengetahuan Dan Kesadaran Pajak Bagi Umkm Dalam Rangka Menciptakan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan Di Desa Bangkoor, Kecamatan TaliburA. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(5), 9942-9947.
- Dekrita, Yosefina A., and Emilianus E. K. Goo. *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori & Praktik*. Eureka Media Aksara, 2024
- Elni, Y., Wellem, I., & Wulandari, C. A. (2024). Analisis Proses Pemberian Pinjaman Dalam Mitigasi Risiko Kredit Sebagai Solusi Kredit Macet Pada Ksp Kopdit Pintu Air. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3579-3585.
- Febronia, V., & Goo, E. E. K. (2024). Prosedur Pengajuan Dan Realisasi Kredit Pada KSP Kopdit Hiro Heling Cabang Utama. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 67-76.
- Florantino, A., Wellem, I., & Transilvanus, V. E. (2024). Efektifitas Perencanaan Penanganan dalam Upaya Percepatan Pengentasan Permukiman Kumuh. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 563-568.
- Florida, M. I., Rengga, A., & Luju, E. (2024). Analisis Anggaran Kas Dalam Meningkatkan Likuiditas Pada Ksp Kopdit Pintu Air Rotat Indonesia. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(2), 4358-4368.
- Goo, E. E. K. (2024). Pengaruh Total Assets Turn Over Terhadap Return On Assets Pada KSP Kopdit Pintu Air. *AKUNTANSI 45*, 5(1), 86-91.
- Hastuti, Y., Sanga, K. P., & Kurniawan, A. P. (2024). Implementasi Sistem Daperma (PT. Pandai) Pembayaran Klaim Asuransi dalam Pelunasan Hutang Anggota Meninggal Dunia pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*, 5(2), 1280-1290.
- Lorang, M. H. D., Obon, W., & Yulianti, M. (2024). Peran Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3682-3686.
- Mado, Y. J., Irwansyah, R., Kasnowo, K., Irdhayanti, E., & Khairunnisa, K. (2024). The Influence of Organizational Culture on Service Quality with Compensation as a Moderate Variable. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 1638-1648.
- Maristela, T. N., Mitan, W., & Goo, E. E. K. (2024). Analisis Strategi Keunggulan Bersaing Usaha Penjahit Rumahan dengan Pendekatan Analisis SWOT: Studi Kasus pada Usaha Jahit Ibu Mersi di Desa Habi. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 20(2), 01-10.
- Noeng, A. Y., & Nuwa, C. A. W. (2024). Pengaruh Quality of Work Life dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan KSP Kopdit Pintu Air Cabang Maumere. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(2).
- Nuwa, C. A. W., Luju, E., Wisang, I. V., & Fatima, T. A. (2023). Pengaruh pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Ilin Medo Kecamatan Waiblama. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(1), 705-713.
- Prilosadoso, B. H., Salamessy, M., Yahya, A. S., Afrizal, D., & Mado, Y. J. (2024). Socialization of Improving the Quality of Public Services Through Digital-Based Integrated Village Governance in Villages. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 1025-1030.
- Rino, R. Y., Dekrita, Y. A., & Da Silva, Y. (2024). Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Sikka. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(3), 5637-5652.
- Samosir, M. S., Dekrita, Y. A., & Wulandari, C. A. (2022). Trend Kinerja Keuangan Koperasi Kredit Simpan Pinjam: Perspektif Arus Kas Operasi (Studi pada Koperasi Primer di Puskopdit Swadaya Utama Maumere). *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 7(2), 397-408.

- Sunggu, Y. F. E., Wellem, I., & Tonce, Y. (2024). Peran Kelitbangan Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Desa Berbasis Kajian Di Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 4165-4169.
- Subu, F. K., Rengga, A., & Juru, P. (2024). Analisis Rasio Keuangan Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja Ksp Kopdit Pintu Air Tahun 2017–2021. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(2), 4230-4238.
- Sugo, Y. N., Kurniawan, A. P., & Muda, V. A. (2024). Peran BAPELITBANG dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Di Kabupaten Sikkap. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 345-354.
- Titin, T., Dilliana, S. M., Tonce, Y., Tanur, E. A., & Winarti, T. (2024). Increasing Village Community Knowledge Through Socialization of the waste Independent Village Program. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(2), 262-268.
- Tonce, Y., Transilvanus, V. E., Meylano, N. H., Luju, E., & Kleruk, A. H. (2022). Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja kerja pegawai melalui kepuasan kerja sebagai Variabel Intervening pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 6210-6217.
- Valentino, G. R., Rengga, A., & Nuwa, C. A. W. (2024). Peran Bapelitbang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Tinjau Dari Retribusi Parkir Daerah Di Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 4159-4164.
- Wela, P. R., Dekrita, Y. A., & Aek, K. R. (2024). Peran Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Melalui Retribusi Penjualan Produk Cokelat Sikka Pada Unit Pelaksana Teknis Sikka Innovation CentrE. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3947-3951.
- Wisang, I. V., Transilvanus, V. E., & Mone, M. M. M. (2024). Pengaruh Beban Kerja Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 82-88.
- Yacob, W., Dekrita, Y. A., & Mone, M. M. M. (2024). Peran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sikka Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3952-3957.